

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII, 2009.

G. H. S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.

Achmad Ali & Wiwie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Leberty, 1988.

M. Luthfan HadiDarus, *Hukum notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

N. E Algra, H. R. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum, Fockema Andreae's, Belanda Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Liliana Toediosaputra, *Malpraktik Hukum Perdata*, Semarang: CV Agung, 1991.

S. F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Peraturan Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Salim HS, *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo.

2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada,

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.



Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2008.

Tan Thong Kie, *Seba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: 9Ichtar Baru Van Hoeve, 1994.

Habib Adjie, *Pembuktian Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Keterangan Ahli Waris)*, Jakarta: Mandar Maju, 2008.

2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung; Refika Aditama.

2017. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama,

2009. *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPperdata*, Jakarta: Intermedia, 1981.

Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hal Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.

R. Soegondo Notodiesoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982

Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung. Nusa Media, 2006,

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008.

2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang-Undangan



Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbanagan

### **Jurnal**

Khalam Farozy, Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris, Jurnal .Unisula.ac.id

Ghansham Anand. Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari Penghadap. Journal article Lambung Mangkurat Law. March 2017

Arief Rahman Mahmoud, Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta, Universitas Brawijaya, Malang, 2014

IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Journal Cendekia Email: subaidishalli@yahoo.co.id Di Akses Tanggal 10 Maret 2020

### **Sumber- sumber lain**

Alwesius, S.H., M.Kn Notaris-PPAT id.wikipedia.org/wiki/Sidik\_jari Di Akses tanggal 22 Januari 2020

Wawancara dengan Notaris L pada tanggal 14 Januari 2020

Wawancara dengan Notaris E pada tanggal 22 Januari 2020

Wawancara dengan Notaris R pada tanggal 24 Januari 2020



Wawancara dengan notaris H pada tanggal 26 Pebruari 2020

Wawancara dengan Sekertaris Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Januari 2020

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/30/sidik-jari-dalam-akta-notaris/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/tugas-dan-kewenangan-notaris.html>

